

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah menjadi krusial karena mengelola perekonomian daerah secara langsung. Desentralisasi fiskal idealnya mampu mendorong peran tersebut dalam menciptakan daerah yang mandiri dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan program. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ekonomi pembangunan inklusif khususnya dengan mengkaji literatur desentralisasi fiskal.

Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model sebagai parameter dengan data panel dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2019. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dan Kementerian PPN.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap ekonomi pembangunan inklusif. Namun demikian, PDRB nyatanya berpengaruh secara positif signifikan terhadap ekonomi pembangunan inklusif. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ekonomi pembangunan inklusif. Artinya, jika pengangguran terbuka mengalami penurunan maka kondisi tersebut dapat membantu pencapaian ekonomi pembangunan inklusif di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: *Derajat Desentralisasi Fiskal, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ekonomi Pembangunan Inklusif.*